

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Bintoro, Rahadi Wasi dkk, *Hukum Acara Perdata*, Unsoed Press, Purwokerto, 2022.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.
- Ishaq, H, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Johan, Bahdren Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Nandar Maju, Bandung, 2008.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Ramdani, Dani, *Eksekusi Putusan Perkara Hak Kuasa asuh Anak yang Berkepastian dan Berkeadilan di Indonesia dan Malaysia*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Rasyid, A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Perada, Jakarta, 2001.
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Soersoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1978.

S, Bambang Sugeng A dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Ligitasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007.

### **Jurnal**

Ery Agus Priyono dkk, Arti Penting Jawaban atas Gugatan sebagai Upaya Mempertahankan Hak-Hak Tergugat, *Law, Developmet & Justice Review*, Vol 2, 2019.

Basri, Achmad Hasan, Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol.2, Issue 2.

Mustofa, Imron, Jendela Logika dalam Berfikir : Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah, *EL-BANAT : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, Nomor 2, 2016.

Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, *Jurnal Al-Hukama The Indonesia Journal of Islamic Family Law*, Vol 7, No. 1, 2017.

Rezky Mokondongan dkk, Gugatan Rekonvensi dalam Sengketa Pertanahan menurut perspektif Hukum Perdata, *Lex Privatium*, Vol.VIII, No.2, 2020.

Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawian, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia*, Vol 7, No. 2, 2016.

Sitorus, Syahrul, Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet), *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No.1. 2018.

Sari, Devina Puspita, Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata, *Undang:Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

*Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *Staatblad* Nomor 16 Tahun 1848

*Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) *Staatblad* 1927 No 227

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

**Putusan Pengadilan :**

Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4635/Pdt.G/2018/PA.Cbn

